



LAPORAN
KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI RIAU

MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2017-2018
30 November – 2 Desember 2017

SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2017

I. LATAR BELAKANG

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember //44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Sumber Daya Alam Provinsi Riau merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Riau yang meliputi pertanian, pertambangan, pertanian/ perkebunan, kehutanan, kelautan/perikanan, dan industri/ jasa. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang dipilih untuk dilaksanakan kunjungan kerja karena merupakan provinsi yang memiliki sumber minyak dan gas yang sangat besar, dimana salah satu perusahaan yang telah lama mengelola sumber daya alam ini adalah Chevron Indonesia yang merupakan 10 besar penghasil migas di Indonesia.

Secara Nasional Chevron Indonesia mengelola wilayah kerja di beberapa titik di Riau dan Kalimantan Timur, dimana dapat dicatat antara lain :

- Dari tahun 2009 hingga 2013, Chevron dan mitra-mitranya memberikan kontribusi sebesar Rp455 triliun bagi pendapatan pemerintah Indonesia.
- Pada tahun 2013, Chevron dan mitra-mitranya berkontribusi sebesar Rp120 triliun terhadap PDB Indonesia.
- Pada tahun 2013, Chevron dan mitra-mitranya menghasilkan Rp7,7 triliun pendapatan pribadi bagi pekerja Indonesia.
- Pada tahun 2013, kegiatan operasi Chevron telah menciptakan 260.000 lapangan kerja (baik langsung, tidak langsung, maupun imbasan). berasal dari tenaga air dan tenaga surya. Selain itu juga kaya dengan sumber daya mineral.

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) mengoperasikan dua lapangan migas utama di Sumatera yaitu Duri dan Minas. Selain itu, CPI juga mengoperasikan Pelabuhan Dumai, terminal pengangkutan minyak terakhir. Sebagian besar produksi CPI di Sumatera pada tahun 2015 berasal dari lapangan-lapangan di Blok Rokan. Duri, sebagai lapangan terbesar, telah beroperasi menggunakan teknologi injeksi uap (steamflood) untuk meningkatkan produksi sejak 1985 dan menjadi salah satu pengembangan injeksi uap terbesar di dunia. Pada tahun 2015, teknologi injeksi uap diterapkan untuk pengelolaan 77 persen lapangan-lapangan di Duri. Proyek pengembangan injeksi uap Area 13 Lapangan Duri telah diselesaikan pada tahun 2015 dengan mulai berproduksinya semua sumur dan tuntasnya tahap injeksi pada akhir tahun dan mengoptimalkan program injeksi air (waterflood) di Lapangan Minas.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
3. Keputusan Rapat Intern tanggal 20 November 2017 Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke Provinsi Riau adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dengan melihat langsung 3 (tiga) hal utama di PT Chevron Pacific Indonesia terkait :

1. Rencana Kerja CPI 2018 dan imbasnya kepada penerimaan negara baik di sektor pajak maupun PNBK ke Pusat dan Daerah
2. Implementasi Penggunaan Meter Flow.
3. Program Pengelolaan Lingkungan

IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau adalah tanggal 30 November – 2 Desember 2017. Dengan agenda antara lain sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Kepala SKK Migas, Direktur Utama PT Chevron Pacific Indonesia dan Mitra Kerja terkait di Provinsi Riau.

2. Kunjungan lapangan ke lapangan migas Minas, untuk melihat secara langsung kondisi terkini pengelolaan migas di Minas oleh CPI.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN KUNKER

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan migas di Riau yang dilaksanakan PT Chevron Pacific Indonesia sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku dilaksanakan sebagai berikut :

1. Paparan Direktur Utama CPI dan diskusi dengan Tim Kunker yang dilaksanakan di Kantor CPI di Lapangan Minas.

- a. CPI diestimasikan hanya mampu menghasilkan minyak sebesar 180rb barel per hari.

- b. CPI akan mampu memproduksi mencapai 200rb barel per hari jika diijinkan melaksanakan pengeboran sumur2 baru atau dengan mengimplementasikan teknologi IOR

- c. CPI telah melakukan uji coba teknologi IOR dan biayanya telah dimasukkan sebagai bagian dari Cost Recovery tahun 2016, namun tdk layak secara keekonomian karena perhitungan biaya produksi \$80 per barel.

- d. CPI menyampaikan bahwa induk perusahaan di Amerika sdh memiliki saat ini dengan menggunakan teknologi IOR dan biaya hanya \$20 per barel

- e. CPI memaparkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR sebagaimana diharapkan oleh para stakeholders

- f. Lokasi Tanah Terkontaminasi Minyak dilaporkan sebanyak 124 titik + 1 lokasi seluas 1,3juta m2 dan telah diselesaikan serta terdapat 800 lokasi lainnya yg dalam tahap pemetaan.

- g. CPI menyampaikan bahwa saat ini ada pola pengelolaan limbah dengan metode Landfilled yang lebih ekonomis

h. CPI menyampaikan bahwa Pemerintah mendapatkan share jauh lebih besar dari bagian CPI yaitu 92 : 8

2. Peninjauan di lahan yang terkontaminasi untuk memastikan bioremediasi dilaksanakan dengan baik.

a. Lokasi yg ditinjau adalah di area lapangan Minas berjarak hanya 15 menit dari kantor site

b. Proses dilaksanakan dengan metode Landfilled

3. Diskusi dan pendalaman

a. Tim Kunker menyampaipakan bahwa dari hasil kunjungan sebelumnya terkait implementasi teknologi IOR yg pada kenyataannya sdh masuk sebagai Cost Recovery namun tidak berdampak pada peningkatan produksi CPI

b. Tim Kunker menerima masukan dari masyarakat sekitar wilayah kerja CPI bahwa mereka tidak menikmati dampak kegiatan operasi yang dilaksanakan CPI. Misalnya masih ada desa yg berdekatan dengan lokasi lapangan Minas belum teraliri listrik alias masih gelap.

c. Penanganan TTM masih belum clean and clear baik pada aspek metode dan biaya penanganannya.

d. Paparan yang disampaikan Dirut CPI belum sepenuhnya terbuka. Ada kesan masih ada yang ditutup2i.

VI. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK

Anggota kunjungan spesifik adalah Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan representasi dari fraksi-faksi di Komisi VII DPR RI sebagaimana dalam lampiran.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan antara Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI dengan pihak Chevron Pacific

Indonesia dan mitra kerja terkait yg hadir, dapat disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. CPI diminta untuk memberikan daftar lokasi tanah yang akan dipulihkan sebanyak 800 titik berikut rencana penanganannya secara rinci dan disampaikan kepada Komisi VII.

2. CPI diminta untuk menyampaikan rincian biaya IOR dengan skema biaya 80\$ vs di bawah 40\$ kepada Komisi VII berikut alokasi biaya IOR yg telah disertakan dalam bagian Cost Recovery 2016.

3. CPI diminta melengkapi proyeksi produksi termasuk pendapatan buat negara yang semula hanya sampai tahun 2017 menjadi smp dg tahun 2021.

4. CPI diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pemulihan TTM secara rinci termasuk biaya per m3 dan metoda pelaksanaannya.

5. CPI diminta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR atau kemasyarakatan lainnya berdasarkan lokasi dan biaya serta fokus pembinaannya selama 5 tahun terakhir kepada Komisi VII ke depan diminta untuk memprioritaskan peruntukannya bagi desa dan masyarakat sekitar tambang dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan wakil rakyat agar tepat sasaran.

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau, sebagai bahan tindak lanjut dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ke depan.

Jakarta, 6 Desember 2017
Pimpinan Tim Kunspek